

## PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

**Muhammad Dwi Nurfaisal<sup>1\*</sup>, Suhaeti<sup>2</sup>, Muhammad Tegar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

\*Email: dosen03014@unpam.ac.id

### ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa merupakan prasyarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan masih belum optimal, termasuk di Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan pembangunan desa serta merumuskan strategi peningkatan partisipasi yang kontekstual. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion* (FGD), dan simulasi pengawasan pembangunan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, ditandai dengan keterlibatan aktif dalam diskusi, meningkatnya keberanian menyampaikan pendapat, serta selanjutnya akan dibentuk kelompok pengawas masyarakat Desa Kopo. Pendekatan edukatif-partisipatif berbasis konteks lokal terbukti efektif dalam memperkuat peran masyarakat sebagai aktor pengawasan pembangunan desa.

**Kata Kunci:** partisipasi masyarakat, pengawasan pembangunan desa, transparansi

### ABSTRACT

*Community participation in monitoring village development is essential for transparent and accountable governance. However, such participation remains limited in Kopo Village, Serang Regency. This Community Service Program aims to enhance public awareness and understanding of development oversight and identify effective strategies to strengthen participation. Using a participatory approach through educational sessions, focus group discussions, and monitoring simulations, the program demonstrates increased community engagement and awareness. The establishment of a Community Monitoring Group indicates strengthened participatory oversight and offers a replicable model for village development governance.*

**Keyword:** community participation, village development monitoring, transparency

### PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa masyarakat berhak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sebagai bentuk demokrasi lokal dan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa. Partisipasi yang efektif tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa (UU Desa).

Namun dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah. Sebagai contoh di beberapa desa di Indonesia, masyarakat cenderung hanya hadir secara fisik dalam forum musyawarah tanpa memberikan kontribusi substantif terhadap keputusan pembangunan desa (Rambu Ana & Ga, 2021). Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi masyarakat terhadap proses kebijakan dan ketidaktahuan tentang hak partisipatif mereka.

Kondisi ini juga diperkuat oleh penelitian empiris yang menemukan bahwa kendala utama partisipasi di desa termasuk dominasi elit lokal, minimnya sosialisasi perencanaan pembangunan, serta keterbatasan ruang dialog antara pemerintah desa dan warga. Dalam beberapa kasus, aturan formal tidak diikuti dengan implementasi partisipatif yang sesungguhnya, sehingga hasil pembangunan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat (Nurfaisal, Maulana, & Sari, 2025).

Selain itu, literatur terbaru menunjukkan bahwa konsep *good governance* yang mencakup partisipasi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas, tidak hanya relevan untuk tingkat pusat dan daerah, tetapi juga harus terinternalisasi di tingkat desa (Kusumoningtyas et al., 2025). Penerapan prinsip tata kelola yang baik ini akan berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Nurfaisal et al., 2020).

Penelitian mengenai strategi partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa keterlibatan warga tidak dapat dipandang sebagai bagian terpisah dari keseluruhan proses, tetapi harus dipandang sebagai mekanisme pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan. Strategi peningkatan partisipasi melibatkan sosialisasi intensif, penyediaan ruang dialog yang kondusif, serta penguatan lembaga masyarakat sebagai mediator antara warga dan pemerintah desa (Samaun et al., 2022).

Menurut kajian empiris lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa sering kali dipengaruhi oleh tingkat akses masyarakat terhadap informasi publik, seperti laporan keuangan desa dan dokumen rencana pembangunan. Akses informasi yang terbatas mengakibatkan kurangnya pemahaman warga tentang proses dan alokasi anggaran, sehingga partisipasi dalam pengawasan menjadi terhambat (Nurfaisal, Maulana, Sari, et al., 2025).

Konteks partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh faktor sosial-kultural. Di beberapa wilayah, masyarakat masih memposisikan diri secara pasif terhadap aparat desa karena struktur norma sosial yang menempatkan pemerintah desa sebagai pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan (Bidjuni et al., 2025). Kondisi ini memperkuat ketergantungan warga pada pemerintah desa dan melemahkan inisiatif warga dalam kontrol sosial.

Studi lain menyebut bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan tidak boleh dipisahkan dari partisipasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat secara komprehensif dalam seluruh siklus pembangunan desa meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan dan mendorong warga untuk aktif mengawal pelaksanaan program pembangunan desa (Heri & Supardal, 2024).

Keterlibatan aktif masyarakat juga terbukti mampu memperkuat legitimasi pemerintahan desa dan mengurangi potensi konflik sosial yang muncul akibat keputusan pembangunan yang tidak partisipatif (Yulia et al., 2024). Ketika warga merasa suaranya didengar dan diperhatikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah desa cenderung meningkat, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas sosial dan keberlanjutan program pembangunan (Hanip et al., 2025).

Dalam konteks Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, observasi awal menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan publikasi informasi melalui baliho di kantor desa, penggunaan website dan media sosial desa sebagai sarana keterbukaan informasi belum optimal. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya dapat memanfaatkan peluang partisipatif dalam pengawasan pembangunan desa secara efektif. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sistematis dan kontekstual untuk memperkuat peran serta warga dalam pengawasan pembangunan desa.

## METODE

Kegiatan PkM dilaksanakan di Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan mengenai pengawasan pembangunan desa, diskusi kelompok terarah (FGD), serta simulasi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

Peserta kegiatan terdiri dari perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi kegiatan, dan pencatatan hasil diskusi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman, kesadaran, dan pola partisipasi masyarakat setelah kegiatan PkM dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyuluhan dan Diskusi Kelompok Terarah

Pelaksanaan kegiatan PkM di Desa Kopo menunjukkan dinamika partisipasi yang meningkat, namun secara bertahap. Pada sesi penyuluhan awal, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif, ditandai dengan minimnya pertanyaan dan tanggapan. Namun, setelah narasumber mengaitkan materi dengan kasus konkret pembangunan desa, seperti pembangunan jalan

lingkungan dan saluran drainase, respon peserta menjadi lebih aktif dan kritis.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah

Diskusi kelompok terarah (FGD) menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan keluhan terkait pelaksanaan pembangunan desa. Dalam forum ini, masyarakat mulai berani mengemukakan persoalan terkait keterlambatan proyek, kualitas hasil pembangunan, serta minimnya sosialisasi penggunaan anggaran desa. Fakta ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan ruang yang aman dan difasilitasi secara akademik, potensi partisipasi mereka dapat berkembang secara signifikan.

Simulasi pengawasan partisipatif yang dilakukan pada kegiatan PkM, memperlihatkan peningkatan kapasitas praktis masyarakat. Peserta mampu memahami tahapan sederhana pengawasan pembangunan, mulai dari mencocokkan rencana kegiatan dengan realisasi lapangan, mengamati kualitas pekerjaan, hingga menyusun laporan pengamatan sederhana. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat merupakan kunci utama dalam mendorong pengawasan partisipatif yang efektif.

## 2. Pembentukan dan Peran Kelompok Pengawas Masyarakat Desa Kopo

Salah satu capaian penting dari kegiatan PKM ini adalah terbentuknya *Kelompok Pengawas Masyarakat Desa Kopo* yang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan unsur BPD. Kelompok ini dirancang sebagai wadah pengawasan sosial yang bersifat non-formal namun memiliki legitimasi sosial di tingkat desa.



**Gambar 2.** Foto bersama Kelompok Pengawas Masyarakat

Kelompok Pengawas Masyarakat berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, serta rekomendasi terkait pelaksanaan pembangunan. Keberadaan kelompok ini memperkuat mekanisme *social accountability* dan mendorong terciptanya hubungan yang lebih transparan dan kolaboratif antara pemerintah desa dan warga.

Dalam konteks Desa Kopo, pembentukan kelompok ini menjadi langkah awal menuju pelembagaan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Meskipun demikian, keberlanjutan peran kelompok ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah desa dan komitmen masyarakat untuk terus terlibat secara aktif.

### 3. Pembahasan dalam Perspektif Tata Kelola Desa

Temuan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat Desa Kopo dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa masih sangat rendah. Selain tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran tata kelola pemerintahan desa bagi warga. Melalui keterlibatan langsung dalam proses pengawasan, masyarakat Desa Kopo mulai memahami tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan desa. Proses ini mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa pembangunan desa bukan semata-mata urusan pemerintah desa, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.



Gambar 3. Informasi APBDes Kopo

Dalam perspektif tata kelola desa, pengawasan partisipatif merupakan elemen penting yang memperkuat prinsip akuntabilitas publik. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam memantau pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa ter dorong untuk menjalankan program secara lebih transparan dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Kondisi ini menciptakan mekanisme *checks and balances* di tingkat desa yang bersifat horizontal, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada lembaga formal seperti BPD, tetapi juga melibatkan warga sebagai aktor pengawasan sosial.

Keterlibatan masyarakat Desa Kopo dalam pengawasan pembangunan desa juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi tata kelola desa. Partisipasi aktif mendorong kebutuhan akan keterbukaan informasi, baik terkait perencanaan program, penggunaan anggaran, maupun progres pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan adanya tuntutan transparansi dari masyarakat, pemerintah desa secara bertahap dituntut untuk memperbaiki sistem penyampaian informasi publik, sehingga proses pembangunan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas.

Selain aspek struktural, pengawasan partisipatif juga berdampak pada penguatan dimensi kultural tata kelola desa. Kegiatan PkM mendorong perubahan pola relasi antara pemerintah desa dan masyarakat dari hubungan yang bersifat hierarkis menuju hubungan yang lebih dialogis dan kolaboratif. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya memposisikan diri sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran secara konstruktif. Perubahan budaya ini merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola desa yang inklusif dan demokratis.

Secara keseluruhan, temuan kegiatan PkM di Desa Kopo menunjukkan bahwa sinkronisasi antara tata kelola desa dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa dapat diwujudkan melalui penguatan partisipasi masyarakat. Pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan desa serta kepercayaan publik. Dengan demikian, kegiatan PkM ini berkontribusi pada penerapan prinsip *good village governance* yang menempatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa pada awalnya masih relatif rendah. Masyarakat cenderung memposisikan diri sebagai penerima hasil pembangunan dan belum sepenuhnya memahami peran strategisnya dalam mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi tata kelola desa, serta budaya relasi yang masih bersifat hierarkis antara pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan PKM, terjadi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Penyuluhan, diskusi kelompok terarah, dan simulasi pengawasan mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan pendapat, kritik, dan masukan secara konstruktif. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman masyarakat bahwa pengawasan pembangunan desa merupakan bagian dari hak dan kewajiban warga dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa yang demokratis.

Capaian penting dari kegiatan PKM ini adalah terbentuknya Kelompok Pengawas Masyarakat Desa Kopo sebagai wadah pengawasan sosial yang bersifat kolektif dan partisipatif. Keberadaan kelompok ini berperan dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas sosial, meningkatkan transparansi pelaksanaan pembangunan, serta membangun hubungan yang lebih kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola desa, pengawasan partisipatif terbukti mampu mendukung penerapan prinsip *good village governance* yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

## SARAN

Perlu keberlanjutan pendampingan dan penguatan kapasitas Kelompok Pengawas Masyarakat agar peran pengawasan tidak bersifat temporer. Pemerintah Desa Kopo juga disarankan untuk meningkatkan keterbukaan informasi pembangunan desa melalui pemanfaatan media digital desa secara optimal. Selain

itu, kegiatan PKM selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat dan integrasi pengawasan partisipatif dalam sistem tata kelola desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat terlembaga secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bidjuni, A. M., Gobel, L. Van, & Djaba, M. (2025). Model Desa Mandiri Berbasis Partisipasi Masyarakat Studi di Desa Tolatu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(3), 719–738.
- Hanip, M., Kristianto, A., & Khoirurizka, M. A. (2025). *Eksplorasi Implementasi Good Governance dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember*. November.
- Heri, A., & Supardal. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1376–1388. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.685>
- Kusumoningtyas, A. A., Sari, I., & Nurfaisal, M. D. (2025). Peran Birokrat Desa dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Berbasis Digital. *Jurnal. Ensiklopediaku*, 4(2), 230–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/err.v4i2.2973>
- Nurfaisal, M. D., Maulana, M. A., & Sari, I. (2025). Akuntabilitas Program Kemandirian Desa Berbasis Smart village: Studi Kasus Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 4(2), 97–108. <https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik/article/view/68>
- Nurfaisal, M. D., Maulana, M. A., Sari, I., Oci, Y., Kusumoningtyas, A. A., & Syarkawi. (2025). Perilaku Organisasi. In *Perilaku Organisasi* (1st ed.). Penerbit Yayasan tri Edukasi Ilmiah. [https://books.google.co.id/books/about?id=pqVNEQAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about?id=pqVNEQAAQBAJ&redir_esc=y)
- Nurfaisal, M. D., Mutiarin, D., Saputra, H. A., Latif, I. R., & Iqbal, M. (2020). Smart Village Accountability: Comparative Study in Management BUMDes Tirta Mandiri and BUMDes Giritama As a Village Income Earner in 2018. *Jurnal Imu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 5(1), 20–46.
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>

Samaun, R., Bakri, B., & Risa Mediansyah, A. (2022). The Efforts Of The Village Government To Enhance Community Participation In The Development Of Oluhuta Village At Atinggola Subdistrict In North Gorontalo District. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33.

Yulia, N. A., Pasassung n, Ekadayanti, & Ahmad. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 124–134.

<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh> <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>